

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
(BPR) YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
(LPS)**

TESIS

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan*



Diajukan Oleh :

ADEWIRTANTO ROJA PAING

0920125001

Pembimbing I:
Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H
NIP.196911181994031002

Pembimbing II:
Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H
NIP.195904201986031002

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
(BPR) YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
(LPS)**

**(ADEWIRTANTO ROJA PAING, SH, NIM. 0920125001, Program Studi Magister
Kenotarian Universitas Andalas Padang, 124 hlm. TESIS 2017)**

ABSTRAK

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berperan penting terhadap simpanan debitur pada suatu Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dengan adanya LPS maka simpanan debitur akan lebih terjamin. Apabila BPR tersebut mengalami pailit, maka BPR langsung diambil alih oleh LPS untuk penyelesaian terhadap simpanan debitur sebelum terjadinya likuidasi. Apabila terjadi likuidasi pada suatu BPR maka LPS bekerjasama dengan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) untuk mengembalikan seluruh aset-aset pada BPR tersebut dengan cara penjualan di bawah tangan terhadap segala agunan yang telah diberikan oleh debitur kepada BPR. Adapun permasalahan penelitian yang diajukan adalah *pertama*, bagaimana peran LPS dalam likuidasi BPR yang telah pailit serta cara mengatasinya? *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah BPR yang dinyatakan pailit oleh LPS? Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. *Kedua*, tanggung jawab bank penyimpan atas kelalaian dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan LPS. Dalam hal ini tanggung jawab dikaitkan dengan keharusan untuk berbuat sesuatu atau juga dihubungkan dengan kekhawatiran untuk menerima konsekuensi dalam sesuatu perbuatan. Tetapi apabila diamati lebih jauh, pengertian tanggung jawab selalu berkisar pada kesadaran untuk melakukan, kesediaan untuk melakukan, dan kemampuan untuk melakukan. Dari hasil penelitian dapat diajukan beberapa saran, yaitu *pertama*, LPS diharapkan dapat mengurangi kendala-kendala yang muncul dalam likuidasi BPR yang telah pailit sehingga berdampak sistemik maupun non sistemik. *Kedua*, dengan adanya sanksi-sanksi yang diberikan apabila nasabah tidak mendapatkan haknya terhadap simpanannya di BPR, maka akan dapat mengurangi kerugian nasabah pada BPR yang telah dinyatakan pailit tersebut, sehingga dapat meminimalisir kerugian nasabah terhadap simpanannya.

Kata kunci: Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Pailit, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR THE CUSTOMERS OF PEOPLE'S FINANCIAL BANK (PFB) THAT IS DECLARED BANKRUPT BY THE DEPOSIT INSURANCE AGENCY (DIA)

The Deposit Insurance Agency (DIA) plays an important role in the debtor's deposit in a People's Financial Bank (PFB). With the existence of DIA, the debtor's deposit will be more secure. If a PFB experiences a bankruptcy, its role is immediately taken over by DIA for settlement of the debtor's deposit prior to the liquidation. In the event of liquidation in the PFB, the DIA shall cooperate with the Banking Supervisory Agency (BSA) to return all assets in the PFB by way of sales of any collateral that the debtor has granted to the PFB. In this study, two research problems were posed. *Firstly*, what are the roles as well as obstacles faced by DIA in liquidation of the bankrupt PFB, and how to overcome them? *Secondly*, what kind of legal protection for the customers of PFB declared bankrupt by DIA? Based on the research that has been done by using normative research method - doctrinal law research or library research, can be concluded that: *first*, the establishment of Deposit Insurance Agency (DIA) is needed in order to protect the interest of the customer and also increase the public trust to the bank. *Second*, the responsibility of the Bank for its negligence in performing the obligations shall be in accordance with the provisions of the Deposit Insurance Agency (DIA). In this case, responsibility is associated with the necessity to do something or sometimes associated with the fear to accept the consequences in a deed. However, when observed further, the notion of responsibility always revolves around awareness to do, willingness to do, and ability to do. From the finding of the study, some suggestions can be offered. *First*, DIA is hoped to reduce the constraints that arise in the liquidation of PFB that has been bankrupt, which might cause systemic or non-systemic impact. *Secondly*, with the sanctions given when the customer does not get his/her right to his/her deposit in PFB, it will be able to reduce the customer's loss at the PFB that has been declared bankrupt, so as to minimize the customer's losses to the deposit.

Keywords: People's Financial Bank (PFB), Bankrupt, Deposit Insurance Agency (DIA)

